

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja suatu perusahaan merupakan hasil dari rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dalam kurung waktu tertentu. Salah satu sumber informasi untuk mengetahui dan mengukur kinerja perusahaan adalah laporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia dalam standar akuntansi keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sawir, (2009) mengemukakan bahwa media yang dapat di pakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan adalah laporan keuangan .

Kasmir, (2010). Tujuan Analisis Laporan Keuangan pada dasarnya untuk menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinan di masa yang akan datang. Informasi posisi keuangan dimasa lalu sering kali dijadikan dasar untuk memprediksi posisi keuangan di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan laporan keuangan juga memberikan informasi keuangan sebagai salah satu sumber untuk mendukung penguatan dalam pengambilan keputusan, khususnya dari sisi keuangan perusahaan.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara

demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dimilikinya. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan Pemerintah Daerah tersebut (Rahayu, 2016).

Untuk mewujudkan kemampuan daerah tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan yang persentasenya lebih kecil kepada Pemerintah Pusat sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan Pemda.

Penilaian kinerja suatu perusahaan tidak terlepas pula dari pengaruh sumber daya yang di geluti oleh perusahaan. Harahap, (2002) mengemukakan bahwa sumber daya merupakan modal jangka panjang perusahaan yang tidak hanya menentukan keunggulan persaingan, tetapi juga mengenai peluang pasar yang dapat di layaninya.

Kinerja merupakan suatu pencapaian yang telah direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembanding skema dan pelaksanaannya.

Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Susanti, Raharjo & Oemar (2017) Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keresasian, dan Rasio Pertumbuhan.

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi merupakan badan daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah Kota Tebing Tinggi. Kota Tebing Tinggi sebagai salah satu kota di Sumatera Utara yang memiliki potensi PAD yang cukup kecil dikarenakan wilayahnya yang tidak terlalu luas. Dengan adanya sistem desentralisasi Kota Tebing Tinggi harus mengelola seluruh aktivitas keuangan dengan seefektif mungkin serta harus dapat memberikan inovasi untuk pemerintahannya agar dapat lebih mandiri dalam mengelola serta meningkatkan kinerja keuangan daerahnya.

Laporan keuangan merupakan suatu alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan, dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan mengadakan analisa terhadap pos-pos neraca dapat diketahui atau akan diperoleh gambaran tentang posisi keuangan, sedangkan analisa terhadap laporan rugi laba akan memberikan gambaran tentang hasil atau perkembangan usaha perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Pajak di Kantor BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) Tebing Tinggi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah analisis Rasio varians Keuangan Daerah mengalami perkembangan dalam kinerja keuangan pajak di kantor BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) Tebing Tinggi.
2. Apakah analisis Rasio Pertumbuhan mengalami perkembangan dalam kinerja keuangan pajak di kantor BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) Tebing Tinggi.
3. Apakah analisis Rasio Efektifitas mengalami perkembangan dalam kinerja keuangan pajak di kantor BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) Tebing Tinggi.
4. Apakah analisis Rasio Efisiensi mengalami perkembangan dalam kinerja keuangan pajak di kantor BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) Tebing Tinggi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini menjadi:

1. Bagaimana kinerja keuangan pajak di kantor BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) Tebing Tinggi jikadilihat dari Rasio Analisis varians Keuangan Daerah?
2. Bagaimana kinerja keuangan pajak di kantor BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) Tebing Tinggi jikadilihat dari Rasio Analisis Pertumbuhan?
3. Bagaimana kinerja keuangan pajak di kantor BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) Tebing Tinggi jikadilihat dari Rasio Efektifitas Keuangan Daerah?
4. Bagaimana kinerja keuangan pajak di kantor BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) Tebing Tinggi jikadilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan analisis Rasio Varians Pendapatan Daerah, dalam kinerja keuangan pajak di kantor BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) Tebing Tinggi.

2. Untuk mengetahui perkembangan analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah, dalam kinerja keuangan pajak di kantor BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) Tebing Tinggi.
3. Untuk mengetahui perkembangan analisis Rasio Efektifitas dan Pajak Daerah dalam kinerja keuangan pajak di kantor BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) Tebing Tinggi.
4. Untuk mengetahui perkembangan analisis Rasio Efisiensi dan Pajak Daerah dalam kinerja keuangan pajak di kantor BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) Tebing Tinggi.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan serta manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan di bidang manajemen khususnya menh analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan.

b. Manfaat Bagi Perusahaan

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi perusahaan agar lebih meningkatkan kembali kinerja keuangan yang dimiliki perusahaan yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan untuk memprediksi pertumbuhan laba pajak dengan menggunakan analisis rasio keuangan.

c. Manfaat Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan yang keseluruhannya menggunakan kajian ilmu manajemen khususnya manajemen keuangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Keuangan

Keuangan diperlukan oleh setiap perusahaan untuk memperlancar kegiatan operasinya. Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian (2002), berpendapat bahwa pengertian keuangan sebagai berikut : “Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrument yang terlibat dalam transfer uang di antara individu maupun antara bisnis dan pemerintah”.

Pendapat diatas dapat di simpulkan pengertian dari pembelanjaan adalah keseluruhan usaha untuk mempersiapkan dan mengatur penarikan dan penggunaan dana dimana didalamnya sudah termasuk aktifitas perencanaannya dan pelaksanaannya

2.1.2 Pengertian Kinerja Keuangan

Selama ini belum ada keseragaman dalam pengertian kinerja, ada yang lebih condong melihat kinerja sebagai pelaksanaan kegiatan organisasi, namun ada juga yang lebih memilih kinerja sebagai preestasi kerja suatu organisasi. Pengukuran kinerja keuangan pada hakekatnya mempunyai banyak tujuan, seperti di ungkapkan oleh Munawir, (2000) yaitu:

- a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perusahaan saat ditagih.

- b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dilikuidasikan, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profibilitas, adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu.
- d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, adalah melakukan usahanya dengan stabil, yang di ukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga atau hutang-hutangnya dengan tepat waktu, serta kemampuan perusahaan untuk membayar deviden secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan adalah prestasi yang di capai oleh perusahaan dibidang keuangan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Disisi lain kinerja keuangan menggambarkan kekuatan struktur keuangan suatu perusahaan dan sejauh mana dengan asset yang tersedia perusahaan sanggup meraih keuntungan. Hal ini berkaitan erat dengan manajemen (Khususnya manajer keuangan) dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien.

2.1.3 Laporan Keuangan

Kinerja keuangan dapat diukur dengan angka-angka yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Penjelasan-penjelasan dalam sub bab ini berupa : pengertian laporan keuangan dan jenis-jenis laporan keuangan.

2.1.3.1 Pengertian Laporan keuangan

Sadeli, (2002) menyatakan bahwa “Laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Laporan keuangan disajikan oleh suatu perusahaan sebagai media komunikasi dan pertanggung jawaban kepada berbagai pihak yang berkepentingan, misalnya : pemilik perusahaan, pemerintah dan kreditor. Laporan ini menggambarkan posisi keuangan yang menunjukkan tentang kekayaan perusahaan dan sumbernya, perubahan posisi keuangan menunjukkan kemajuan perusahaan, hasil yang di capai yang menunjukkan laba atau rugi.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri atas beberapa jenis. Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2004), menyatakan bahwa “ Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, Laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya laporan arus kas atau laporan arus dana) catatan dalam laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industry dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”. Walaupun terdapat berbagai jenis laporan keuangan, tapi menurut Jusup, (2003), bahwa “Laporan keuangan utama yang dihasilkan dari proses akuntansi adalah neraca dan laporan rugi laba” Berikut ini hanya dijelaskan laporan keuangan yang di butuhkan dalam penelitian ini, yaitu neraca dan laporan laba rugi.

2.1.3.3 Unsur-Unsur dan Bentuk Neraca

Menurut Sadeli, (2002) bahwa : “Neraca adalah suatu daftar keuangan yang memuat ikhtisar tentang harta , utang dan modal suatu unit usaha atau perusahaan pada suatu saat tertentu, biasanya pada penutup hari terakhir dari suatu bulan atau tahun”. Sesuai pengertian ini, maka unsur-unsur neraca adalah aktiva, utang dan modal sendiri :

1. Aktiva merupakan bentuk dari penanaman modal perusahaan, yang unsur – unturnya meliputi aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva diklasifikasikan menurut likuiditasnya, yaitu aktiva yang lebih lancar di tempatkan di bagian atas. Aktiva lancar adalah aktiva yang dapat di harapkan direalisir menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama jangka waktu yang normal atau biasanya satu tahun. Misalnya : kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dagang dan persediaan. Aktiva tidak lancar meliputi : investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, biaya yang di tangguhkan , dan aktiva tidak lancar lainnya.
2. Investasi jangka panjang adalah investasi yang bertujuan untuk : menguasai perusahaan lain, memperoleh hasil dari investasinya, menciptakan dana untuk berbagai tujuan, membangun hubungan atau kerja sama dengan perusahaan lain dan menganekaragamkan suatu perusahaan. Misalnya : saham dan obligasi yang di terbitkan oleh perusahaan lain, harta yang disewakan kepada pihak lain karena tidak digunakan dalam kegiatan rutin perusahaan dan dana yang diperuntukkan bagi tujuan khusus selain pembayaran utang jangka pendek.

3. Aktiva tetap adalah aktifa berwujud yang bersifat relative permanent, yang digunakan dalam operasi normal perusahaan dan dibeli dengan tujuan bukan untuk dibeli kembali. Misalnya : tanah, gedung, dan mesin.
4. Aktiva tidak berwujud adalah aktiva yang berupa hak-hak yang dimiliki perusahaan yang dilindungi oleh undang-undang. Misalnya : Hak cipta, hak merek dagang, dan hak paten.
5. Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang dapat di kelompokkan dalam aktiva-aktiva tersebut sebelumnya. Misalnya : kas pada bank dinegara asing, persediaan sulit di jual dan gedung dalam proses pembangunan.
6. Utang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang atau jasa kepada pihak lain pada tanggal tertentu. Unsur-unsur utang meliputi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang di klasifikasi menurut tab jatuh tempo, yaitu utang yang berjangka lebih pendek di tempatkan di bagian atas.
7. Utang jangka pendek adalah utang yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang normal, umumnya setahun atau kurang.
8. Utang jangka panjang adalah utang yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang melebihi setahun.

Neraca dapat di buat dalam bentuk rekening dan bentuk laporan. Dalam bentuk rekening (account from), berarti aktiva di tempatkan di sebelah kkiri; sedangkan utang dan modal sendiri ditempatkan disebelah kiri; sedangkan utang dan modal sendiri ditempatkan disebelah kanan. Dalam bentuk laporan (report from), berarti aktiva ditempatkan dibagian atas; sedangkan utang dan modal sendiri ditempatkan dibagian bawah aktiva.

2.1.3.4 Unsur-Unsur dan Bentuk Laporan Laba Rugi .

Menurut Sadeli, (2002) bahwa “laporan laba rugi adalah suatu daftar yang memuat ikhtisari tentang penghasilan, biaya serta hasil netto suatu perusahaan periode tertentu”. Sesuai pengertian ini maka unsur-unsur laporan laba rugi adalah penghasilan dan biaya.

1. Penghasilan, yang utama bagi suatu perusahaan adalah penjualan barang atau jasa kepada pembeli, penyewa dan lain-lain.
2. Harga pokok penjualan, harga pokok barang yang dibeli yang kemudian berhasil di jual.
3. Biaya usaha, biaya usaha meliputi biaya pemasaran dan biaya administrasi/ umum adalah biaya yang timbul sehubungan dengan pemasaran barang atau jasa. Misalnya biaya iklan, biaya transportasi penjualan dan gaji bagian penjualan. Biaya administrasi/ umum adalah biaya yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan fungsi administrasi/ umum. Misalnya biaya pemeriksaan pembukuan, gaji pegawai kantor dan gaji director.
4. Penghasilan lain-lain dan biaya lain-lain adalah penghasilan dan biaya yang tidak ada hubungannya dengan usaha pokok perusahaan, misalnya : pada perusahaan perhubungan, penghasilan sewa, biaya bunga dan biaya sewa.

Laporan laba rugi dapat dibuat dalam bentuk rekening dan bentuk laporan. Dalam bentuk rekening berarti biaya di tempatkan disebelah kiri dan penghasilan di tempatkan di sebelah kanan. Sedangkan saldonya menunjukkan laba atau rugi. Dalam bentuk laporan, berarti penghasilan di tempatkan dibagian atas, sedangkan biaya ditempatkan di bagian bawah penghasilan.

Dalam bentuk laporan ini, terdapat lagi bentuk langkah tunggal dan bentuk langkah berganda. Dalam bentuk langkah tunggal (single step), berarti semua penghasilan dari manapun sumbernya digabung menjadi satu kemudian dikurangi dengan semua biaya. Dalam bentuk langkah berganda (multiple step), terdapat beberapa langkah yaitu:

1. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan, di peroleh laba kotor.
2. Laba kotor dikurangi biaya usaha, diperoleh laba atau rugi usaha.
3. Laba atau rugi usaha ditambah atau dikurangi selisih antara penghasilan lain-lain dengan biaya lain-lain, diperoleh laba sebelum pajak penghasilan.
4. Laba sebelum pajak penghasilan dikurang pajak penghasilan diperoleh laba

2.2 Analisa Laporan Keuangan

Kinerja keuangan dinilai melalui analisa laporan keuangan. Penjelasan-penjelasan dalam sub bab ini berupa: pengertian dan tujuan analisa laporan keuangan, prosedur analisa laporan keuangan metode analisa laporan keuangan dan teknik analisa laporan keuangan.

2.2.1 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Menurut Stice Dkk, (2009) bahwa “anlisis laporan keuangan adalah mempelajari hubungan antara angka-angka dalam laporan keuangan dan tren dari angka-angka tersebut dari waktu ke waktu”. Sesuai pengertian ini, maka analisis laporan keuangan bertujuan :

- a. Untuk mengevaluasi kinerja berupa keadaan keuangan, hasil usaha dan kemajuan keuangan perusahaan.
- b. Untuk prediksi kinerja di masa mendatang berdasarkan kinerja masa lalu.

Evaluasi kerja dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menghubungkan antara angka-angka dalam laporan keuangan, yang dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, termasuk dalam bentuk rasio keuangan.

2.2.2 Prosedur Analisa Keuangan

Munawir, (2004) menyatakan bahwa Analisa laporan keuangan dilakukan dengan mengikuti prosedur berikut ini.

- a. Mempelajari atau meriview laporan keuangan secara menyeluruh dan kalau dianggap perlu, maka diadakan penyusunan kembali terhadap laporan keuangan sesuai prinsip-prinsip yang berlaku umum dan tujuan analisa.
- b. Melakukan analisa keuangan berupa perhitungan- perhitungan dengan menggunakan metode dan teknik yang dibutuhkan sesuai tujuan analisa
- c. Melakukan interprestasi berdasarkan hasil perhitungan-perhitungan tersebut di atas.

Maksud dari prosedur pertama di atas, perlunya mempelajari atau mereview laporan keuangan secara menyeluruh adalah untuk meyakinkan kepada penganalisa bahwa laporan itu sudah cukup jelas, sehingga penganalisa akan mendapatkan laporan keuangan yang dapat di analisa. Prosedur pertama ini disebut analisa akuntansi.

Sehubungan dengan perlunya analisa akuntansi ini, maka laporan keuangan biasanya diperiksa lebih dahulu, misalnya oleh akuntan public atau badan pengawas keuangan dan pembangunan. Selain itu, hasil pemeriksaan harus dengan kualifikasi” wajar tanpa pengecualian” atau kualifikasi” wajar dengan pengecualian”.

2.3 Metode Analisa Laporan Keuangan

Munawir, (2004) menyatakan bahwa metode analisa laporan keuangan adalah metode tentang penentuan beberapa periode laporan keuangan yang dibutuhkan sesuai tujuan analisis. Metode analisa laporan keuangan meliputi metode horizontal dan metode vertical.

- a. Metode horizontal atau metode dinamis adalah metode analisa yang membutuhkan laporan keuangan dari beberapa periode akuntansi atau dari tahun ke tahun.
- b. Metode vertical atau metode statis adalah metode analisa yang hanya membutuhkan laporan keuangan hanya dari satu periode akuntansi atau satu tahun.

Metode analisa laporan keuangan mana yang dibutuhkan oleh peneliti, tergantung tujuan penelitian.

2.4 Teknik Analisis Laporan Keuangan

Munawir, (2004) menyatakan bahwa tehnik analisa laporan keuangan adalah peralatan yang digunakan dalam menganalisa laporan keuangan. Teknik analisa laporan keuangan, antara lain meliputi:

2.4.1. Analisa Perbandingan Laporan Keuangan

Teknik ini biasa digunakan sebagai langkah awal untuk teknik-teknik analisa lainnya. Munawir, (2004) menyatakan bahwa: Membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan menunjukkan:

- a. Data absolute atau jumlah-jumlah dalam rupiah.
- b. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah.
- c. Kenaikan atau penurunan dalam persentase.

- d. Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio.
- e. Persentase dari total

2.4.2. Analisa Rasio, Jenis-Jenis dan Rasio Standar

Untuk menganalisa kinerja keuangan suatu perusahaan, diperlukan alat analisa rasio, sebagai alat pengukur lemah atau kuatnya suatu perusahaan didalam bidang finansialnya.

Muslich, (2000) menyatakan bahwa analisis rasio merupakan alat utama dalam analisis keuangan, karena analisis itu dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan terutama keadaan keuangan perusahaan. Selain itu hasil rasio sangat berguna bagi pengembangan atau kebijaksanaan perusahaan itu sendiri maupun pertimbangan pihak luar perusahaan, misalnya bank dalam memberikan fasilitas kredit dan investor dalam merencanakan modalnya.

Harahap, (2002) mengemukakan analisis rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil pembandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos-pos laporan keuangan lainnya yang saling berhubungan.

Adapun yang dikemukakan oleh Syafruddin, (2004) bahwa rasio dapat dihitung berdasarkan financial statement yang tersedia terdiri dari:

- a. Neraca (Balance sheet) yang menunjukkan posisi financial perusahaan pada suatu saat tertentu.
- b. Laba rugi (Income statement) yang merupakan laporan operasi perusahaan pada periode tertentu.

Hasil dari analisa rasio tersebut yang menggambarkan situasi keuangan perusahaan, tidak dengan hanya menganalisa rasio itu sendiri-sendiri, namun disusun beberapa rasio sebagai pembandingan. Dalam menganalisa rasio, sumber data

yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan yaitu neraca dan laporan laba rugi.

Analisa rasio biasa juga disebut rasio keuangan. Munawir, (2004) menyatakan bahwa Analisa rasio adalah analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Harahap, (2002) menyatakan bahwa Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan. Keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti).

Analisa rasio dapat dibagi atas beberapa jenis. Riyanto, (2001) menyatakan bahwa berdasarkan sumber datanya, maka rasio keuangan meliputi:

- a. Rasio Neraca, yaitu Rasio yang dihitung dengan menggunakan data yang bersumber dari neraca. Misalnya Current ratio.
- b. Rasio laporan laba rugi yaitu rasio yang dihitung dengan menggunakan data yang bersumber dari laporan laba rugi. Misalnya operating ratio.
- c. Rasio antar laporan yaitu rasio yang di hitung dengan menggunakan data yang berasal dari neraca dan laporan laba rugi. Misalnya perputaran persediaan.

2.5 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintahan RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat 35 kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Menurut kamus akuntansi manajemen, “kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah

yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Sijabat, Saleh & Wachid (2013) menyatakan “Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”

Lubis & Hafni (2017) menyatakan “kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil yang telah dicapai dari penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah atas pelayanan kepada masyarakat dapat diukur dengan menilai efisiensi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk menilai kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai keberhasilan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Pilat & Morasa (2017) menyatakan bahwa “Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.”

Sedangkan menurut Ardila & Putri (2015) menyatakan “Kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah adalah hasil pencapaian yang diperoleh dari kegiatan yang telah direncanakan yang diukur dengan menggunakan indikator keuangan bertujuan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya.

2.5.1 Tujuan Kinerja Keuangan Daerah

Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Sinambela, Saragih & Sari (2018) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Secara umum, tujuan penilaian kinerja adalah menurut Pramono (2014):

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya.
3. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional

2.5.2 Manfaat Kinerja Keuangan Daerah

Manfaat Pengukuran Kinerja menurut Dewi (2018) menyebutkan lima manfaat adanya pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan, yaitu:

2.5.2.1 Pengukuran kinerja meningkatkan mutu

Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja ini akan memungkinkan pemerintah untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu. Di samping itu dapat juga dipilih metode pengukuran kinerja untuk melihat kesuksesan program yang ada.

Di sisi lain, adanya pengukuran kinerja membuat pihak legislatif dapat memfokuskan perhatian pada hasil yang didapat, memberikan evaluasi yang benar terhadap pelaksanaan anggaran serta melakukan diskusi mengenai usulan-usulan program baru.

2.5.2.2 Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal

Dengan adanya pengukuran kinerja ini, secara otomatis akan tercipta akuntabilitas di seluruh lini pemerintahan, dari lini terbawah sampai teratas. Lini teratas pun kemudian akan bertanggungjawab kepada pihak legislatif. Dalam hal ini disarankan pemakaian system pengukuran standar seperti halnya *management by objectives* untuk mengukur *outputs* dan *outcomes*.

2.5.2.3 Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik

Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi kinerja pemerintah kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik. Keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin besar dan kualitas hasil suatu program juga semakin diperhatikan.

2.5.2.4 Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan

Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya kemampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu program. Tanpa ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak pernah akan dinilai dengan obyektif.

2.5.2.5 Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas

Untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif. Masyarakat semakin kritis untuk menilai program- program pokok pemerintah sehubungan dengan meningkatnya pajak yang dikenakan kepada mereka

2.5.3 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Dewi, Dharmawan & Werastuti (2015) faktor- faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah, antara lain :

1. Partisipasi penyusunan anggaran.
2. Kualitas sumber daya manusia.
3. Sistem pengendalian intern pemerintah.
4. Pengawasan fungsional.
5. Penerapan sistem informasi akuntansi.

Sedangkan menurut Ridwan & Mus'id (2019) Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi sektor publik, antara lain :

1. Tujuan yang jelas dan terukur.
2. Motivasi kerja.
3. Sistem pengukuran kinerja.
4. Insentif desentralisasi.
5. Partisipasi dalam penyusunan anggaran.

2.5.4 Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Sinambela & Pohan (2016) Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil, manfaat, dan dampak.

2.6 Rasio Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Menurut Fathah (2017) salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Menurut Susanti, Raharjo & Oemar (2017) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Alat rasio keuangan adalah analisis rasio

keuangan yang diukur berdasarkan data keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (Lubis & Hafni, 2017).

Salah satu perangkat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan di dalam APBD adalah dengan melakukan analisa terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisa rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dimana hasil analisa rasio keuangan ini selanjutnya akan digunakan sebagai tolak ukur dalam (Utomo, 2011):

Sedangkan menurut Pramono (2014) bentuk dari analisis aset meliputi :

- a. Analisis pertumbuhan.
- b. Analisis proporsi.
- c. Analisis modal kerja.
- d. Analisis rasio :
 1. Rasio likuiditas.
 2. Rasio Solvabilitas.
 3. Rasio *leverage*

Menurut Pramono (2014) Tujuan dari masing-masing rasio keuangan adalah :

- a. Analisis pertumbuhan yaitu melakukan perbandingan nilai tiap- tiap pos aset dalam neraca dengan tujuan untuk mengetahui persentase perubahan posisi aset pemerintah daerah selama dua perioda berurutan.
- b. Analisis proporsi bermanfaat untuk melihat potret aset pemerintah daerah secara lebih komprehensif, yaitu apakah kelompok aset tertentu nilainya terlalu besar atau terlalu kecil dari nilai yang wajar .

c. Analisis modal kerja bermanfaat untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang, menggunakan dana cadangan atau penggunaan pos pembiayaan lainnya.

d. Analisis rasio :

1. Rasio likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi utang yang jatuh tempo.

2. Rasio solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut Susanti, Raharjo & Oemar (2017) Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kerasian, dan Rasio Pertumbuhan.

2.7 Pajak

2.7.1 Pengertian Pajak

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha harus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada negara di mana perusahaan itu menjalankan kegiatan usaha. Di Indonesia menganut sistem self assessment dalam pemungutan perpajakan. Sistem self assessment merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang,

kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

2.7.2 Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak yaitu antara lain:

- a. Pajak sebagai sumber dana atau penerima (budgetair), yaitu pajak sebagai penghimpun dana dari masyarakat ke dalam kas negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.
- b. Pajak sebagai pengatur (regulerend), yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dewa (2015)	Analisis kinerja keuangan Pt Indofood Sukses Makmur Tbk di bursa efek indonesia	Penelitian kuantitatif dengan menggunakan studi deskriptif	Hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan instrumen analisis yang telah disebutkan di atas bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio likuiditas yang telah diukur dengan menggunakan CR adalah IL Liquid sedangkan QR adalah Liquid; 2. Solvabilitas yang telah diukur dengan menggunakan DAR dan DER dipecahkan; 3. Kegiatan yang telah diukur dengan menggunakan RTO dan ITO efisien. Sementara itu, TATO yang tidak efisien; 4. Profitabilitas yang telah diukur dengan menggunakan GPM, NPM, dan ROA efisien. Sementara itu, ROE tidak efisien
2.	Rachmawati (2013)	Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan Koperasi pegawai Republik Indonesia (kpri) tegak Kecamatan	Metode deskriptif kuantitatif merupakan metode yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan angka	Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Current ratio tahun 2010-2012 sebesar 592,88%, 739,69%, 824,50%, rata-rata tahun 2010 – 2012 sebesar 719,02%, kriteria tidak baik. 2. Quick ratio tahun 2010-2012 sebesar 585,14%, 724,84%,

		sentolo Yogyakarta		<p>806,80%, rata-rata tahun 2010 – 2012 sebesar 705,60%, kriteria tidak baik.</p> <p>3. Cash ratio tahun 2010- 2012 sebesar 25,52%, 22,27%, 53,85%, rata-rata tahun 2010-2012 sebesar 33,88%, kriteria tidak baik.</p> <p>4. Net worth to debt ratio tahun 2010- 2012 sebesar 287,70%, 368,14%, 428,07%, rata-rata tahun 2010-2012 sebesar 361,303%, kriteria baik.</p> <p>5. Total asset to debt ratiotahun 2010- 2012 sebesar 387,70%, 468,15%, 529,19%, rata-rata tahun 2010-2012 sebesar 461,68%, kriteria baik.</p>
3.	Anisa (2016)	Analisis kinerja keuangan ditinjau dari rasio profitabilitas dan aktivitas pada PT Kimia Farma tbk trading dan distribution cabang Samarinda	Output dan outcome	<p>Hasil dari analisis yang penulis lakukan terlihat bahwa tingkat profitabilitas perusahaan pada tahun 2011-2013 dari segi gross profit margin dalam kondisi baik, dari segi net profit margin dalam kondisi kurang baik, dari segi ROA dalam kondisi kurang baik, dan dari segi ROE dalam kondisi kurang baik. Sedangkan tingkat rasio aktivitas pada tahun 2011-2013 diukur dari segi receivable turnover dari segi inventory turnover dalam kondisi baik, dari segi fixed turnover dalam kondisi kurang baik</p>

2.9 Konsep Operasional

Konsep Operasional Dalam penelitian ini terdapat satu variabel yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

2.9.1 Rasio Efektivitas

Rasio evekivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah Mahsun (2009).

Model Rasio Efektivitas :

$$\text{Rasio Efektifitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

2.9.2 Rasio Varians Pendapatan Daerah

Analisis varians pendapatan daerah dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis Kinerja Keuangan Pendapatan. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variansce*). Berikut ini rumus untuk menghitung Analisis Varians Pendapatan Daerah:

$$\text{Rasio Varians Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan} - \text{Target Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100 \%$$

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan tahun } t}{\text{Target Pendapatan tahun } t} \times 100\%$$

2.9.3 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis pertumbuhan pendapatan daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja pendapatannya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Analisis pertumbuhan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan perhitungan berikut:

$$\text{Pertumbuhan Tahun } t = \frac{\text{pendapatan tahun } t - \text{pendapatan tahun } (t-1)}{\text{pendapatan tahun } t} \times 100 \%$$

2.9.4 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

2.10 Variabel Penelitian

Definisi variabel penelitian menurut Sugiyono, (2012) adalah sebagai berikut: “Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.”

Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel, yaitu: Variabel bebas (Independent Variable) Yaitu suatu variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas menurut Sugiyono, (2012) adalah sebagai berikut: “Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependend (terikat).”

2.11 Kerangka Pemikiran

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya.

Salah satu perangkat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan di dalam APBD adalah dengan melakukan analisa terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisa rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Utomo, 2011).

Dalam Peraturan Pemerintahan RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat 35 menyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Menurut Lubis & Hafni (2017) “kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”.

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah menurut Susanti, Raharjo & Oemar (2017) yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: Rasio Varians Pendapatan Daerah, Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak. Dengan melihat hasil analisis tersebut dapat diketahui bagaimana hasil kinerja keuangan di Kota Tebing Tinggi. Kerangka berfikir dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

